

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan: Studi Empiris Pemanfaatan Dana SPP dan UEP

Jose Rizal Jansoef
Agus Suman

Abstract: In micro manner, PPK via Productive Economy Enterprise (UEP) and Loan-Deposit for Women (SPP) activities can result in an average additional income in amount of 10 percent per year for their debtors. It means that when an individual borrow a sum of money from PPK in amount to one million rupiah, his income gets increased to be one hundred rupiah (= Rp1.000.000 x 0,10) per year due to this kind of loan. Further, if 249 respondents of Productive Enterprise were processed separately from 263 respondents of SPP, it was found that the impact amount of SPP loan (0,12) was twofold larger than that of UEP loan group (0,06). This difference can be explained with two things, the arrears factor and the debt loan factor. These two factors seem interlocking. The higher the debt (because the debtors borrow from another places like bank cooperative), the higher possibility for them not to pay the debts. In contrast, the higher the amount and the longer its period, the debt will be too difficult to be paid back. In this case, SPP was little bit better than UEP. These factors were partially affected the demand for SPP (relatively than UEP). The sum of arrears will be larger when it has longer period, above all, there will be any another debtors being unable to pay their debts back. This will make queuing time longer to get UEP money as the loan. In addition, the larger debt of UEP debtors, they will get depressed, causing the probability for them to arrears the installment, so that the queuing time for UEP candidates get longer. In such situation, SPP becomes relatively interesting better than UEP. In case of arrears payment, SPP relatively better than UEP. This is in relevant to the frequency of group meeting. It is possible for the group to remind each other (by, for example, satire or direct speech) to pay the installment if they have higher frequency meeting. Spearman correlation between the arrears and meeting frequency within SPP group was -0,208, whereas in UEP group was -0,154. These findings implied the power of group coordination in reducing arrears, in which such power was imperative in SPP better than in UEP. Why the group coordination in SPP was so imperative? In rural society culture, women were demanded to handle more their domestic roles, so that they are reluctant not to stay at home for long period of time, above all leaving their village. This role makes possible for them to interact intensively with their own group in such a way that social coordination function could occur frequently. Such role made them also to choose more to think seriously how to pay back the debt to their group rather than being embarrassed cause of having arrears.

Keywords: municipality development program (pp4), poverty, productive economy enterprise, loan-deposit special for women

Kata "evaluasi" berasal dari kata kerja "evaluate," yang menurut kamus Webster dimaknai sebagai (a) to ascertain or fix the value or worth of sesuatu (b) to examine and judge carefully; appraise dan/ atau (c) to calculate the numerical value of; express numerically. Tiga pengertian ini memudahkan kita untuk membayangkan bahwa ketika sebuah program

sedang under evaluation, program itu didatangi oleh seseorang untuk memastikan (ascertain) serta mengamati (examine) dengan seksama (carefully) dan kemudian menyematkan nilai numerik (numerical value) kepada program itu untuk mengindikasikan apakah program telah/sedang dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Sebuah program pemerintah yang menjadi perhatian artikel ini adalah PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur. Cakupan wilayah pelaksanaannya adalah 2.202 desa dalam 131 kecamatan dalam 27 kabupaten. PPK adalah bagian dari upaya Pemerintah Propinsi Jawa Timur (e.g. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS)) untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Penanggulan kemiskinan ala PPK ini dilakukan melalui: (a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (c) Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal; (d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (e) Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.

Secara lebih spesifik, program PPK ditujukan untuk: (a) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal; (c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan; (d) Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat; (e) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Pendek kata, program PPK pada derajat tertentu adalah program pengaliran dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan (Keterangan lengkap tentang program PPK dapat dibaca dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (FTO PPK), yang disusun oleh Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (2005)). Pengalokasian dana PPK ini di antaranya adalah untuk pembangunan sarana/prasarana, untuk pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP), untuk pendidikan dan kesehatan, dan untuk simpan-pinjam perempuan (SPP).

Paragraf di atas tidak dipahami melalu bahwa "PPK = Uang". Memang ada dana yang digalirkan oleh PPK, tetapi dana itu diatur pengalokasiannya dan dikompetisikan untuk memenangkannya. Kompetensi menjadi syarat utama bagi setiap dusun dan/atau desa

yang ingin mengakses dana PPK. Tentu saja kompetensi ini harus dilakukan secara sehat dalam arti (1) mengutamakan usulan yang terbaik, mendasak, dan dibutuhkan bagi dusun dan/atau desa; (2) menghindari adanya dominasi dalam penentuan usulan yang terbaik tersebut; (3) mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan; dan (4) unsur aparat dan kesehatan sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan di tingkat dusun dan/atau desa.

Ketika kebijakan pemerintah apapun telah diarahkan sedemikian rupa untuk menuju kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya, maka perhatian yang mendasak untuk segera dijawab adalah sejauhmanakah peningkatan kesejahteraan masyarakat atau mejinjam istilah Meier (1995:7) yaitu *upward movement of the entire social system* telah terjadi sebagai akibat dari kebijakan itu. Macam pemerintahan apakah pemerintahan di bawah seorang diktator atau pemerintahan demokratis, pemerintahan di bawah seorang raja atau pemerintahan yang dikendalikan oleh dewan (memadahkan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya sebagai komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tidak ada satu pemerintahan pun yang menginginkan masyarakatnya jatuh miskin, dan semua pemerintahan menginginkan masyarakatnya sejahtera.

Segala ikhtiar untuk memahami sebuah masyarakat (*community*), harus berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat adalah sebuah entitas yang *ruw-et (complex)*, yang tidak mudah diabstraksikan oleh satu disiplin ilmu tertentu. Kompleksitas ini disebabkan dua hal. Pertama, terminologi "masyarakat" sulit untuk didefinisikan mengingat bahwa masyarakat cenderung memiliki kearifan (*wisdom*) sendiri dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif seperti halnya desa atau kecamatan. Ini berarti usaha untuk memotret perkembangan masyarakat dalam sebuah wilayah administratif, sering dengan terpaksa harus meniadakan dinamika masyarakat, atau paling tidak mengabdikan bahwa "masyarakat = individu-individu di dalam wilayah administratif." Oleh karena itu, adalah cukup bereslah apabila istilah masyarakat ditzinkan untuk dapat saling dipertukarkan dengan istilah, misalkan, "kecamatan" atau "daerah".

Kedua, masyarakat mengandung makna kemajemukan (*diversity*) di antara individu-individu yang berada di dalam masyarakat itu. Ia bukanlah sebuah

eritas yang memaksa para anggotanya untuk berpikir dan bertindak seragam. Seorang individu dalam sebuah masyarakat berperilaku mikro dan makro sekaligus. Ketika ia memandang dirinya adalah bagian yang terpisah dari individu-individu yang lain, maka ia berperilaku mikro (*individual behaviour*). Sebaliknya ketika ia memandang dirinya sebagai bagian dari yang lain, maka ia berperilaku makro-bermasyarakat (*social behaviour*). Kenyataan bahwa individu adalah satu (*micro*) dan banyak (*macro*) sekaligus, memaksa kita untuk menjelaskan realitas masyarakat dengan mempertimbangkan *historically transmitted pattern* (meminjam istilah Geertz, 1973:89) yang mengikat individu-individu dalam sebuah masyarakat. *Historically transmitted pattern* tidak lain adalah budaya (*culture*), yang oleh Hofstede (1994) diartikan sebagai "... *collective mental programming: it is that part of our conditioning that we share with other members of our nation, region, or group but not with members of other nations, regions, or groups*".

Kita tahu bahwa setiap pengambilan keputusan penting dalam pelaksanaan PPK di lapangan, kompetisi menjadi syarat utama bagi setiap dusun dan/atau desa yang ingin memenangkan dana PPK. Kompetisi ini mudahlah dipahami mengingat ketersediaan *resources* PPK untuk masyarakat adalah sangat terbatas (*limited*) sementara keinginan masyarakat dan kita sendiri cenderung tidak terbatas (*unlimited*). Untuk bisa unggul dalam kompetisi yang sehati itu, ada beberapa wahana atau tahapan kompetitif yang harus dilalui, yaitu Masyarakat Dusun (Madesun), Masyarakat Khusus Perempuan, Masyarakat Desa (Madesdes).

Pelaksanaan PPK dalam masyarakat pedesaan (*rural community*), secara teoretis, lebih mudah dilakukan. Ada pendapat bahwa komunitas pedesaan memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan aktivitasnya secara kolektif, yang kemungkinan disebabkan oleh pola pekerjaan mereka yang tidak memisahkan pembagian kerja (*job description*) dan alokasi waktu secara tegas (Soekanto, 1990:166-171). Ritme hidup mereka yang lebih lambat, membuat mereka memiliki waktu lebih untuk secara mendalam melakukan interaksi sosialnya. Kebiasaan ini tentu memberi kesempatan kepada mereka untuk memikirkan atau bahkan "mencampuri" urusan orang lain.

Kemiskinan dalam sebuah masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dinilai (*assessing*). Perkara

ini muncul sejak tahun 1970-an, ketika para pakar ekonomika mendapat kritikan tajam karena "terlalu memuja" pendapatan (*income*) per kapita (GDP per kapita) sebagai indikator kemiskinan. Semakin kecil GDP per kapita yang dihasilkan oleh suatu masyarakat, maka semakin miskin masyarakat itu.

Kritikan tajam yang dilancarkan kepada pemaja GDP ini kemudian dijawab dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam GDP sehingga menjadi *purchasing power adjusted real GDP*. *Penransformasian* GDP per kapita sehingga mencerminkan daya beli ini akan membuat GDP suatu wilayah menjadi *fair* jika dibandingkan dengan GDP wilayah (atau negara) lain.

GDP per kapita berdasarkan daya beli ini tidaklah serta-merta kemudian disatifikasi oleh semua sarjana. Indikator ini dianggap "sangat ekonomi" sehingga tidak memberikan ruang bagi sarjana-sarjana non-ekonomi untuk berbicara tentang kemiskinan. Indikator ini dikatakan hanya mencerminkan kuantitas, dan tidak berbicara tentang kualitas hidup masyarakat. Dari sisi kemudian lahir indikator alternatif untuk mengukur kemiskinan, yaitu *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau lebih dikenal sebagai *basic need approach*. PQLI adalah sebuah indikator kesejahteraan yang mempertimbangkan kecukupan sandang, kecukupan pangan, dan ketersediaan papan.

Cerita tentang perkembangan indikator kemiskinan belum berakhir. Ketika kita mengamati dan kemudian harus menjelaskan kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan sangnya, kecukupan sandang, pangan, dan kecukupan papan, kita kemudian disadari atau tidak akan segera mengaitkan "apa yang terlibat" dengan anugerah-anugerah lainnya yang bersifat non-ekonomi (moral) dan non-fisik seperti kesehatan dan pendidikan. Apa yang kemudian sering terucap secara reflek dari mulut kita, misalnya, adalah: "Sayang, si Fulan kaya tetapi sakit-sakitan," atau "Adah kasihan, dia kaya tetapi buta huruf." Ucapan ini mengindikasikan persapaikita bahwa si Fulan beban sepelenya kaya. GDP *as such* gagal dalam menjelaskan kemiskinan.

Bank Dunia (UNDP) dalam sebuah laporannya tahun 1990, memperkenalkan *human development Index* (HDI). HDI ini kemudian diindonesiakan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu: lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka

melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot sepertiga); dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP rupiah). Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat, juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal itu selanjutnya akan meningkatkan produktivitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak (Meier, 1995:7-32).

Uraian di atas menegaskan bahwa pendapatan masyarakat atau GDP, bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan bukan lagi melulu bersangkut-paut dengan uang nominal yang diterima sebagai pendapatan (*income*). Ia tidak juga berbicara tentang ketersediaan sandang, pangan, papan. Ia harus pula mempertimbangkan aspek pendidikan dan aspek kesehatan.

Perdebatan mengenai bagaimana mengukur kemiskinan ternyata masih berlanjut. Sebuah aliran kecil yang menyeruk masuk ke dalam arus besar *welfare economics* adalah aliran yang menyatakan bahwa tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam upaya menjajahterakan masyarakat secara keseluruhan. Bagi Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya, argumen ini dapat dipahami karena:

- Perempuan, dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung dugaan ini, bahwa wanita umumnya lebih menyukai televisi daripada media cetak. Jumlah wanita yang menjadi konsumen televisi adalah 52,7% dibandingkan dengan konsumen surat kabar atau majalah yang hanya 15,7%. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, seperti masa tanam dan masa panen.
- Oleh karena, perempuan lebih banyak bekerja di sektor domestik, maka mereka lebih banyak mengetahui kebutuhan nutrisi dan kesehatan bagi keluarganya.
- Adanya kendala (*constraint*) bagi perempuan untuk mengakses kredit kecil (*microfinance*) untuk usaha. Banyak laporan yang menyatakan

bahwa perempuan sering menjadi *market target* dari tentara (*moneylenders*), tukang gada (*pawnbrokers*), dan penjual barang-barang kebutuhan rumah tangga (seperti: sandang dan peralatan dapur) dengan fasilitas kredit.

Usaha untuk menangkap semua indikator kemiskinan yang dicontohkan di atas tentunya bukanlah tanpa tantangan. Tantangan berikutnya yang segera menghadang adalah bagaimana mengukur kemiskinan dan sejauhmana ketersediaan data kemiskinan. Meskipun demikian, studi ini "*should not prevent us from making use of whatever data may be readily available already*" (Sen, 1985:73).

METODE

Data studi ini adalah berjenis primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari masyarakat penerima manfaat dana PPK melalui wawancara yang dipandu oleh kuesioner. Dalam kuesioner ini, ada dua jenis data yang diolah, yaitu: (a) data dengan skala ordinal; dan (b) data dengan interval.

Data kemudian diolah oleh statistik, yaitu dengan menetapkan variabel-variabel mana yang hendak diamanai keterkaitannya. Yang dimaksud variabel adalah sekumpulan/serentetan dengan karakteristik yang sama, yang hendak diamati perubahan-perubahannya. Katakan kita memiliki variabel *X* dan variabel *Y*, *X* sebagai variabel bebas (*independent variable*) dan *Y* sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Tentu saja kedua variabel ini bukan sembarangan, tetapi dua buah data yang secara *apriori* dapat dihubungkan.

Yang dimaksud berhubungan secara *apriori* adalah, misalnya, hubungan antara harga mobil responden dengan pendapatan responden; hubungan antara suhu kota dengan konsumsi air mineral; hubungan antara penampakan titik rumah dengan pendapatan pemilik rumah; dan hubungan antara konsumsi kopi dengan konsumsi rokok. Sedangkan contoh hubungan yang secara *apriori* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis adalah, misalnya, hubungan antara jumlah anak seorang ibu di suatu kota dengan corak hujan di kota itu atau hubungan antara konsumsi kopi dengan konsumsi minyak tanah.

Dalam kasus tertentu, analisis regresi tidak dapat dilakukan karena salah satu atau kedua datanya adalah berskala ordinal (*ordinal-scaled*). Sempitnya analisis regresi tidak dapat digunakan untuk data-data

ordinal, kekuatan (*strength*) dan arah hubungan di antara dua variabel ordinal masih bisa dihitung dengan *Spearman rank correlation*.

Sebagai contoh, misalkan ada dua data: pendapatan responden (X) dengan *interval scale* dan kondisi fisik rumah responden (y) dengan *ordinal scale*. Untuk mendapatkan koefisien *Spearman rank correlation*, kita harus 'mengordinalkan' data pendapatan responden. Misalkan ada 8 responden dengan pendapatan yang terkecil Rp.430 dan yang terbesar Rp620. Yang terkecil diberi rank 1 dan yang terbesar diberi rank 8. Setelah angka yang terbesar dan terkecil 'dikunci' masing-masing dengan rank 1 dan 8, pendapatan enam responden yang berada di antara keduanya diberi rank 2, 3, 4, 5, 6, 7, sesuai dengan besarnya pendapatan rupiahnya. Simbolkan hasil penransformasian data pendapatan ini yaitu dari data interval menjadi data ordinal sebagai x .

Koefisien *Spearman rank correlation* (r_s) dihitung dengan formula:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

di mana $d_i = x_i - y_i$, yaitu perbedaan antara setiap pasangan peringkat. Untuk menyatakan apakah tingginya x mengindikasikan tingginya y , kita harus membandingkan antara dengan *critical value of the Spearman rank correlation coefficient*. Jika, pada tingkat keyakinan tertentu, lebih besar (kecil) dari nilai kritisnya, maka besarnya x (tidak) mencerminkan besarnya y .

HASIL

Ada 2 jenis kuesioner untuk studi ini yaitu Kuesioner 1 dan 2 yang disebarluaskan secara acak (*random*) di antara 27 kabupaten di Jawa Timur. Studi ini berhasil menjumpai 274 responden pemanfaat dana UEP untuk menjawab pertanyaan dalam Kuesioner 1, dan mendapat 292 responden pemanfaat dana SPP untuk menjawab pertanyaan dalam Kuesioner 2. Jika ditotal, jumlah kuesioner yang terisi adalah 566 bendel (= 274 + 292), di mana setiap bendelnya terdiri dari 4 halaman. Jika semua bendel kuesioner ditumpuk, mereka akan setebal 2.264 halaman (= 566 x 4) yang

setara dengan setumpuk 4,5 rim kertas HVS 80 gram.

Sebuah Profil Pemanfaat Dana UEP dan SPP

Sasaran PPK adalah masyarakat miskin. Bagaimana mengidentifikasi dan kemudian memahai bahwa ia adalah orang/keluarga miskin, bukanlah perkara yang gampang. Yang dimaksud mengidentifikasi kemiskinan adalah ikhtiar untuk mengenali ciri-cirinya, dan kemudian mengukurnya. Kesalahan dalam mengidentifikasi jelas akan membahayakan kesalahan dalam merembat sebuah sasaran; dan kalau saja terbacak itu ternyata tepat mengenai sasaran itu, mungkin ia merupakan hasil dari serentetan terbacak membahayakan.

Untuk menguji apakah PPK benar-benar sudah mengarah dan 'menembak' si miskin, studi ini mengadakan pengamatan langsung untuk meng-*assess* kondisi fisik rumah responden dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung rumah itu. Sulit sekali untuk mengatakan bahwa penampakan fisik rumah responden di pedesaan mencerminkan tingkat apresiasi responden terhadap seni, daripada tingkat ekonominya. Misalkan, sebuah rumah ber dinding bambu di perkotaan mungkin mencerminkan gaya (*style*) penghuninya. Tetapi, penghuni rumah ber dinding bambu di pedesaan, bisa dipastikan adalah orang miskin.

Ikhtiar untuk meng-*assess* kemiskinan berdasarkan penampakan fisik rumah responden didasarkan pada perasaan dan keyakinan kami bahwa responden yang bertatap tinggal dalam rumah/lingkungan yang kotor, kumuh, dan sempit, maka ia bisa disebut sebagai responden miskin atau sangat miskin. Sebaliknya, mereka yang hidup di dalam lingkungan yang bersih, rapi, dan lapang, maka ia bisa disebut sebagai responden berkecukupan atau kaya.

Dalam studi ini, pemanfaatan dana UEP dan dana SPP dievaluasi dengan memotret bahan lantai rumahnya, bahan dinding rumahnya, bahan plafon rumahnya, bahan atap rumahnya, dan kelayakan sarana/prasarana di sekitar rumahnya. Dalam memberikan evaluasi ini, studi menggunakan *qualitative judgement*, seperti "sangat miskin," "miskin," "cukup," atau "kaya," yang secara berurutan menginformasikan skala gradual tentang tingkat kemiskinan (atau tingkat kesejahteraan). Tentu saja ikhtiar ini tidak memosisi pembenaran seratus persen, apalagi harus disalahkan 100%. Mungkin dimaklumi!

LANTAI. Banyak di antara kita mungkin cenderung mengatakan bahwa si Fulan miskin karena ia bertepatan tinggal dalam rumah yang berlantai tanah atau plester. Atau, si Ali dinilai berkecukupan secara ekonomi (atau tidak miskin) ketika ia menetap dalam rumah yang berhalaman keramik. Tabel 1 bercerita bahwa dari 376 rumah responden yang diamati, ada 14,06% rumah berlantai tanah dan 38,37% berhalaman plester. Jika kedua angka ini dijumlahkan, hasilnya adalah 52,43% (= 14,06% + 38,37%). Artinya, 301 (= 52,43% x 576) responden bisa disebut kaum miskin jika dilihat dari bahan lantai rumahnya. Tidaklah terlalu sulit untuk mengatakan bahwa ia menderita kemiskinan ketika ia tinggal dalam rumah yang berlantai tanah, apalagi plester.

Tabel 1 Penampakan Lantai Rumah Responden

	Tanah	Plester	Triplek	Keramik	Jumlah
Responden UEP	14	99	51	81	245
Responden SPP	47	122	44	76	289
Jumlah	61	221	95	157	576
%	10,59	38,37	16,50	26,94	

Akan tetapi, berlantai tanah tidak serta merta mengindikasikan kemiskinan. Dari cerita yang kami dengar, ada beberapa rumah yang sengaja membiarkan lantainya berhalaman tanah karena tanahnya mudah bergerak. Ketika lantai rumahnya dikeramik, keramiknya retak-retak karena rumahnya berada di atas 'tanah bergerak'. Kasus ini terjadi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.

DINDING. Sama halnya dengan lantai rumah, dengan melihat bahan dinding rumah, kita bisa memberikan *judgement* apakah pemilik rumah itu termasuk golongan sangat miskin, miskin, atau tidak miskin. Tabel 2 melaporkan bahwa ada 31,6% (= 6,42% + 5,73% + 19,44%) dari 576 responden menempati rumah berinding bambu (*goleg*), triplek, dan tembok *plan* bambu. Secara umum bisa diduga bahwa 182 (= 31,6% x 576) responden ini adalah miskin ketika menempati rumah bambu/triplek di lingkungan pedesaan.

Akan tetapi, berindingkan kayu atau triplek tidak serta merta mengindikasikan kemiskinan. Di Kabupaten Lamongan dan Gresik, ada beberapa rumah yang sengaja membiarkan dinding rumahnya terbuat dari kayu atau triplek. Alasannya sama, yaitu tanah di bawah rumah itu tidak stabil.

Tabel 2 Penampakan Dinding Rumah Responden

	Bambu	Triplek	Tembok B Bambu	Tembok	Jumlah
Responden UEP	14	26	31	136	207
Responden SPP	25	15	51	196	287
Jumlah	39	41	82	332	576
%	6,77	7,12	14,24	58,07	

PLAFON. Untuk mengatakan bahwa ia adalah responden miskin dengan melihat plafon rumahnya mungkin sulit. Karena rumah tanpa plafon kadangkala tampak seperti sebuah ayak ketimbang status sosial-ekonomi penghuninya. Anggapan ini mungkin berlaku bagi rumah-rumah di perkotaan. Rumah tanpa plafon di pedesaan cenderung mencerminkan rumah si miskin, jika kita tidak ingin mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat miskin.

Data dalam Tabel 3 melaporkan bahwa ada 70,05% (= 52,94% + 6,83% + 9,28%) dari 571 responden menghuni rumah tanpa plafon, dan kalau pun ada plafonnya, plafon itu terbuat dari bambu (*goleg*) dan/atau triplek. Rasanya, tidaklah begitu sulit untuk mengatakan bahwa 400 (= 70,05% x 576) responden ini bukanlah golongan orang kaya dari penampakan plafon rumahnya.

Tabel 3 Penampakan Plafon Rumah Responden

	Tanpa plafon	Bambu	Triplek	Ayuk	Jumlah
Responden UEP	140	23	26	68	257
Responden SPP	168	16	25	112	341
Jumlah	308	39	51	180	576
%	53,47	6,77	8,85	31,01	

ATAP. Untuk menilai bahwa ia adalah orang miskin dengan memotret bahan atap rumahnya mungkin relatif lebih mudah. Misalkan, rumah dengan atap seng atau asbes gelombang, bisa diduga penghuninya adalah orang miskin. Studi ini melihat bahwa hampir 100% (98,26%) rumah responden beratap genteng (lihat Tabel 4). Dari hasil pengamatan ini, sulit sekali mengatakan bahwa mayoritas penghuninya adalah orang kaya. Bisa jadi klasifikasi bahan atap rumah, tidak relevan lagi dijadikan sebagai indikator untuk meng-*assess* kemiskinan. Kalau pun indikator ini harus digunakan, rasanya perlu diurai lebih detail macam klasifikasi gentengnya, misalkan genteng kualitas rendah (KW3), genteng kualitas menengah (KW2), dan genteng kualitas tinggi (KW1).

Tabel 4 Penampakan Atap Rumah Responden

	Seng	Asbes	Genteng	Jumlah
Responden UEP	2	5	276	283
Responden SPP	1	2	290	293
Jumlah	3	7	566	576
%	0,52	1,22	98,26	

Setelah penampakan fisik sebuah rumah responden di-analisa, selanjutnya perlu dilihat ketersediaan sarana penunjang rumah itu. Sarana penunjang yang dimaksud di sini adalah, misalkan, jenis jalan dan lebar jalan di depan rumah, status kepemilikan rumah, sumber penerangan di dalam rumah, ketersediaan telepon rumah, sumber air bersih yang sehari-hari digunakan, dan penggunaan MCK.

JENIS JALAN. Yang dimaksud jenis jalan di sini adalah macam bagaimana suatu jalan dikayaskan. Bagaimana suatu jalan dikayaskan dapat diklasifikasi menjadi: (1) Jalan tanah, (2) Jalan batu, (3) Jalan cor, dan (4) Jalan aspal. Studi ini melihat (Tabel 5) bahwa jalan di depan mayoritas responden adalah jalan tidak beraspal, yang berisikan tanah (28,3%), bertaburan batu (19,1%) dan dicor (5,03%). Di dalam lingkungan jalan semacam ini, adalah mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah responden yang tidak kaya, seandainya *feeling* kita ragu-ragu untuk mengatakan bahwa mereka sangat miskin.

Tabel 5 Jenis Jalan di Depan Rumah Responden

	Tanah	Batu	Cor	Aspal	Jumlah
Responden UEP	83	42	13	143	281
Responden SPP	85	68	14	121	288
Jumlah	168	110	27	264	569
%	29,35	19,33	4,76	46,57	

LEBAR JALAN. Lebar jalan di sini dapat mencerminkan kemampuan jalan untuk dilintasi kendaraan, misalkan sepeda motor atau mobil. Dalam kalimat lain, lebar jalan mengindikasikan derajat keterjangkauan (*accessibility*) untuk menuju tempat/rumah tertentu, sekaligus mencerminkan "derajat lalu lintas" jalan itu. Semakin sempit sebuah jalan di depan rumah kita, semakin sulit rumah kita untuk dijangkau, dan semakin sepi jalan itu. Pada umumnya kelebaran jalan di depan rumah menentukan nilai jual-beli rumah itu. Semakin lebar (sempit) jalan di depan sebuah rumah, semakin mahal (murah) harga jual-beli rumah itu.

Studi ini melihat bahwa mayoritas responden tinggal di pinggir jalan yang tidak terlalu lebar. Hanya

12,83% responden tinggal di pinggir jalan yang lebarnya lebih dari 4 meter (lihat Tabel 6). Sedangkan sisanya, yakni 87,17%, tinggal di pinggir jalan setapak (8,23%), jalan 1-2 meter (23,33%), dan jalan 2-4 meter (35,56%). Berdasarkan penampakan ini, berat rasanya untuk mengatakan bahwa mayoritas responden adalah golongan orang kaya.

Tabel 6 Lebar Jalan di Depan Rumah Responden

	Jalan setapak	1-2 meter	2-4 meter	> 4 meter	Jumlah
Responden UEP	23	47	142	41	253
Responden SPP	31	61	154	51	297
Jumlah	54	108	296	92	550
%	9,82	19,64	53,82	16,72	

STATUS RUMAH. Status kepemilikan rumah mencerminkan status sosial-ekonomi penghuni rumah itu. Ketika rumah ini bukan milik sendiri, penghabisannya tentu mengeluarkan sejumlah biaya sewa rumah. Biaya ini tentu menjadi sebuah beban ekonomi tersendiri. Hasil wawancara kami menemukan bahwa mayoritas responden 92,74% dari 565 responden bertempat tinggal di rumah sendiri (lihat Tabel 7). Apakah mereka dapat disebut kaya karena menghuni rumah sendiri?

Tabel 7 Status Kepemilikan Rumah Responden

	Milik sendiri	Bukan milik sendiri	Jumlah
Responden UEP	230	25	255
Responden SPP	274	16	290
Jumlah	504	41	545
%	92,74	7,26	

(Sumber: Lampiran I dan III, di atas)

Dalam masyarakat pedesaan, sulit sekali untuk merumuskan bahwa "memiliki rumah sendiri = kaya," sementara" tidak memiliki rumah = miskin". Mengapa? Dalam masyarakat pedesaan-paguyuban, budaya "kekitaan" biasanya terpelihara sangat kuat, sehingga kepemilikan atas "sesuatu" tidaklah "tegas" dalam masyarakat perkotaan-patembayan. Masyarakat pedesaan bisa dikatakan mengemban budaya paguyuban dan cenderung mengadakan kontrak sosial secara verbal. "Sesuatu" yang dimaksud di sini adalah rumah, sedangkan yang dimaksud "tegas" adalah jelas status hukum kepemilikannya. Studi ini hendak mengatakan bahwa ketika seorang responden menyatakan "Ini adalah rumah saya," maka rumah yang dimaksud dalam kalimat ini dan dalam konteks masyarakat pedesaan paguyuban bisa jadi adalah rumah

keluarga, rumah orang tua, rumah mertua, atau rumah warisan, yang semuanya secara hukum tidak/belum beratasnamakan responden.

Akan menjadi lebih benar jika status kepemilikan rumah responden dieksplorasi secara mendalam. Usaha ini bukanlah tanpa tantangan, dan sangat menyaratkan tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Dalam *setting* budaya masyarakat yang kontrak sosialnya bersifat verbal, *myriad* kepemilikan tanah tempat tinggal meskipun hanya sejenkal tanah adalah masalah yang sangat sensitif dan mengiris. Mengapa?

Sebuah tempat apalagi tempat kosong cenderung mudah ditinggalkan tetapi berat hati untuk ditinggalkan. Jaga, ada hubungan yang kuat antara lamanya penghuni sebuah tempat dengan kegemangan atau keberathutan untuk meninggalkan tempat itu. Ketika sebuah tempat dianggap kosong atau tak terurus atau tak bertuan, orang dengan mudah mendudukinya atau mungkin menjaraknya seraya merumahnya di atas tempat itu. Setelah ditempati atau disewa, ia cenderung menyamakan diri di dalamnya (dengan memperindahkannya). Bahkan, setelah ditempati atau disewa cukup lama, semakin kuat perasaan ingin mengahmilikinya. Semakin lama ia menempati sebuah rumah, semakin enggan atau berat hati ia meninggalkannya, dan semakin kuat ia merasa ingin mengahmilikinya, atau dalam kalimat lain, semakin kuat rasa pertanyaannya dengan rumah yang dihuninya.

Sayangnya, perasaan *myyate* dengan rumahnya tidak dikat dalam kontrak tertulis (*written contract*). Pengakuan masyarakat pedesaan atas hak kepemilikan tanah/rumah biasanya sekadar dibuktikan dengan peristiwa *verbal contract* (bukan *written contract*) antara pihak satu dengan pihak lain. Atau jika tidak ada saksi yang mengatkan adanya *verbal contract* itu, pengakuan mereka didasarkan pada "sejarah keluarga." Di bawah *setting* budaya masyarakat pedesaan sebagaimana dijelaskan di atas, dan untuk menghindari keterbatasan, ketersinggungan, bahkan kemarahan dari seorang responden, adalah sangat dibutuhkan kepiawaian dan kecerdasan *pihu* dalam diri seorang *interviewer* ketika meneliti masalah status hukum rumah responden.

PENERANGAN. Penerangan diklasifikasi menjadi (1) penerangan listrik sendiri dan (2) listrik ikut tetangga. Mayoritas responden (86,87%) menjawab bahwa rumahnya berlangganan listrik sendiri, hanya 13,13% dari 571 responden tidak berlangganan sendiri

(lihat Tabel 8). Studi ini merasa kurang mantap dengan kedua angka ini. Karena, tidak ada satu responden pun yang memilih jawaban "tidak" atau "petromak" sebagai penerang interior rumahnya. Mungkin, menggunakan atau tidak menggunakan penerangan listrik dalam rumah, sudah tidak relevan lagi dipakai sebagai *proxy* untuk mengukur kekuatan ekonomi pemilik rumah.

Di samping itu, jawaban dari kuisioner bahwa penghuni rumah berlangganan listrik sendiri atau *nyaw* listrik dari tetangga, bisa dijelaskan oleh masalah kepemilikan rumah di atas. Kata "sendiri" dalam konteks masyarakat pedesaan-paguyuban, berbeda dengan kata ini dalam konteks masyarakat perkotaan-patembayan. "Sendiri" dalam kalimat "milik sendiri" bisa berarti "kita" atau "kami" atau "saya." Jawaban dari kuisioner bahwa penghuni rumah "berlangganan listrik sendiri" dapat dikejar dengan pertanyaan kuisioner: "Berapa besarnya daya listriknya?", "Siapa yang membayar?", "Berapa tagihan listrik per bulan?", "Pergunaan listriknya untuk apa saja?", "Apakah pernah terlambat membayar listrik?", dan seterusnya.

Tabel 8 Penerangan dalam Rumah Responden

	Listrik sendiri	Ikut tetangga	Jumlah
Responden UFP	247	13	260
Responden SPP	249	42	291
Jumlah	496	75	571
%	86,87	13,13	

TELPON. Telpn adalah salah satu alat komunikasi. Dalam perkembangan-perkotaan, apalagi masyarakat pedesaan, cenderung terkenas bahwa "mempunyai telepon rumah = kaya". Berbeda dengan sarana komunikasi lainnya seperti *handphone* (HP), HP sebagai alat komunikasi, bukan lagi sebuah barang mewah yang hanya dimiliki orang kaya. Sekarang ini, dengan uang Rp250.000, masyarakat sudah bisa memegang HP *second* yang layak pakai.

Studi ini menemukan bahwa dari 78,88% dari 573 responden tidak mempunyai telepon rumah (lihat Tabel 5.10). Apakah mereka ini golongan orang miskin? Meskipun tidak tegas, studi ini menjawab "Ya" Adalah lebih baik jika 78,88% responden ini dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan kuisioner yang lebih merukik. Misalnya, kalau mereka tidak memiliki telepon rumah, tidak memiliki nomor HP, jarang menggunakan telepon umum (*wartel*), dan

kalaupun ke wartel hanya untuk keperluan keluarga bukan bisnis/dagang, maka bisa dipastikan secara tegas bahwa mereka adalah golongan miskin.

MCK. Tabel 10 melaporkan bahwa 67,25% dari 574 responden memanfaatkan sumur untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK). Agak sulit memang untuk mengatakan bahwa mereka ini orang miskin, jika dilihat sarana MCK-nya yang diairi oleh sumur. Sementara bagi 8,16% responden yang sarana MCK-nya di pinggir sungai dan 0,87% responden yang sarana MCK-nya menggunakan air hujan, bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang miskin.

Tabel 9 Keberadaan Telepon Rumah Responden

	Ada	Tidak ada	Jumlah
Responden UEP	48	213	261
Responden SPP	53	239	292
Jumlah	101	452	553
%	21,81	78,88	

Dalam masyarakat pedesaan, sarana MCK sumur umamnya berada di belakang rumah yang terbuka (*outdoor*), sedemikian rupa sehingga sulit untuk melarang orang lain untuk menggunakan sarana MCK itu. Lain halnya dengan sarana MCK pribadi di dalam rumah (*indoor*) yang diairi oleh PDAM. Kita lebih mampu melarang orang lain untuk memasuki sarana MCK pribadi milik kita yang berada dalam rumah (*indoor*).

Di sini hendak ditonjolkan bahwa sumur terbuka *plus* kamar mandinya, pada derajat tertentu akan menjadi sebuah sarana MCK umum (*common*), sangguplah ia dimiliki secara pribadi oleh sebuah keluarga. Kalaupun tidak dimanfaatkan oleh semua orang, ia mungkin dimanfaatkan oleh para tetangga di sekeliling rumah responden. Umumnya, para tetangga ini masih ada hubungan kekerabatan dengan responden. Mereka merupakan 'keluarga besar' responden. Sehingga, sumur terbuka *plus* kamar mandinya di-*outdoor* responden, menjadi sarana MCK umum yang tidak hanya dimanfaatkan oleh keluarga inti responden tetapi juga oleh keluarga besarnya.

Jika sarana MCK umum yaitu sumur terbuka *plus* kamar mandinya tidak dikhususkan untuk satu keluarga pun, maka ia dapat dipakai seluruh keluarga. Ketika tidak ada satu keluarga pun dapat menghaki sarana ini dan semua keluarga (keluarga besar) boleh

memakainya, maka sarana MCK ini menjadi baik semua anggota keluarga besar. Ketika setiap keluarga dalam keluarga besar mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan sarana MCK ini, sementara tidak ada satu keluarga pun yang menghakinya, maka sarana MCK ini menjadi *common good*.

Proposisi di atas menunjukkan adanya kondisi *joint consumption* dan *high exclusion cost* yang melekat pada sarana MCK umum. Semua boleh memakainya bersama-sama (*joint*), tetapi tidak satu pun orang bisa meng-*exclude* orang lain agar tidak memakainya.

Kedua kondisi ini menyebabkan rendahnya insentif untuk memelihara kebersihan sarana MCK umum. Saya mungkin akan berpikir: "Sarana MCK ini bukan milik saya tetapi milik bersama, mengapa saya harus bersusah payah membersihkannya?" Dan kemudian: "Kalau sudah saya bersihkan, jangan-jangan mereka nanti mengotorinya!" Atau saya menduga: "Biar saja kotor, pasti mereka membersihkannya." Kesadaran inilah yang sering membuat sarana MCK umum tampak kotor dan tidak sebat dan bandingkan dengan kamar mandi *indoor* atau pribadi.

Berdasarkan uraian teoritis tentang *common good* di atas, adalah lebih baik jika 67,25% responden pengguna sarana MCK umum ini dikajar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Misalnya, "Sarana MCK sumur itu milik siapa?", "Apakah di dalam atau di luar rumah?", "Sumurnya pakai tali, pompa manual, atau pompa listrik?", "Jika di dalam rumah, siapa saja yang memanfaatkannya?", dan seterusnya.

Sebagai tambahan, ada kalanya masyarakat tidak melakukan aktivitas MCK 'dalam satu atap.' Mereka mungkin mandi dan wudhu (= membersihkan diri sebelum salat dalam Islam) di satu tempat, tetapi buang air di tempat lain, dan/atau mencuci pakaian di tempat lain juga. Penambahan yang tegas antara di mana ia harus mandi, di mana ia harus buang air, dan di mana ia harus mencuci, bisa mencerminkan kelas sosial-ekonomi responden.

Tabel 10 Penggunaan MCK responden

	Sungai	Air hujan	Sumur	Lorong/PELAK	Jumlah
Responden UEP	17	2	191	72	282
Responden SPP	33	3	190	63	289
Jumlah	48	5	381	135	574
%	8,36	0,87	67,25	23,51	

AIR BERSIH. Pola pemanfaatan air untuk MCK yang tampak dalam Tabel 10, hampir sama dengan pola pemanfaatan air sebagai sumber air bersih (bandingkan Tabel 10 dengan Tabel 11). Memanfaatkan air sungai dan air hujan untuk MCK mungkin masih bisa diterima oleh akal sehat kita. Tetapi, memanfaatkan air sungai dan air hujan untuk dimasak dan diminum, tentu sebuah perilaku yang memberikan hati kita.

Ada 24 responden yang menggunakan air sungai untuk kegiatan masak dan minum, dan ada 8 responden yang dan memasak dan minum hujan. Jelas 32 responden ini adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang meminta perhatian dari PPK. Temuan ini tampaknya dapat diuji dua kali, mengingat kegiatan wawancara dilakukan dalam mesin kerajinan.

Tabel 11 Sumber Air Bersih Responden

	Sungai	Air hujan	Sumur	Ledeng/PDA/SL	Pondok
Responden UEP	8	2	110	76	261
Responden SPP	16	6	109	70	291
Jumlah	24	8	219	146	552
%	4,29	1,40	40,51	26,67	

Mari kita berhenti sejenak untuk menyimpulkan apa yang sejauh ini didiskusikan dalam bab 5.1. Studi ini menemukan bahwa:

- Ada 52,43% dari 576 responden bertempat tinggal dalam rumah yang berlatakan tanah dan plester.
- Ada 31,6% (= 6,42% + 3,73% + 19,44%) dari 576 responden bertempat tinggal dalam rumah yang berinding bambu dan/atau triplek.
- Ada 70,05% (= 53,94% + 6,83% + 9,28%) dari 571 responden yang menghuni rumah tanpa plafon, dan kalau pun ada plafonnya, plafon itu terbuat dari bambu (*golong*) dan/atau triplek.
- Ada 52,43% (= 28,7% + 19,1% + 5,03%) dari 576 responden yang menghuni rumah di tepi jalan tidak beraspal, seperti jalan tanah (28,7%), jalan batu (19,1%) dan jalan cor (5,03%).
- Ada 87,15% (= 6,25% + 25,35% + 55,56%) dari 576 responden yang menghuni rumah di tepi jalan setapak (6,25%), jalan 1–2 meter (25,35%), dan jalan 2–4 meter (55,56%).

Berdasarkan kriteria-kriteria ini, disimpulkan bahwa mayoritas pemakai dana UEP dan dana SPP adalah orang miskin. Ini berarti, pada derajat tertentu, masyarakat sasaran yang dibidik oleh PPK adalah cukup tepat.

PEMBAHASAN

Hubungan antara Kondisi Fisik Rumah dengan Pendapatan Responden

Mungkin di antara kita ada yang bertanya: "Berapa persen responden yang rumahnya sekialigus berlatakan tanah, berinding bambu, tanpa plafon, dan berada di tepi jalan setapak yang sempit?" Sebat saja pertanyaan ini mencari tahu jumlah responden yang sangat miskin. Sebaliknya, "Berapa persen responden yang rumahnya sekialigus berlatakan keramik, berinding tembok, berplafon asbes, dan berada di tepi jalan beraspal yang lebar?" Sebat saja pertanyaan ini mencari tahu jumlah responden yang kaya.

Jika sesuatu di antara "sangat miskin" dan "kaya" dispektrumkan, kita akan mendapatkan sebuah skala kemiskinan: (1) sangat miskin, (2) miskin, (3) cukup (tidak kaya dan tidak miskin), dan (4) kaya. Hasil *scaling* ini dilaporkan dalam Tabel 12.

Tabel 12 Kategori Tingkat Kemiskinan Responden UEP dan SPP

Kategori	Jumlah	%
Sangat Miskin	63	10,94
Miskin	274	47,57
Cukup	224	38,89
Kaya	15	2,60
	576	100,00

Berdasarkan penampakan fisik rumah responden, 58,5% dari 576 responden UEP dan SPP adalah masuk kategori sangat miskin (10,94%) dan miskin (47,57%). Sedangkan sisanya, 41,49% dari 576 responden, masuk kategori cukup dan kaya. Tentu saja kaya yang dimaksud di sini adalah kaya dalam konteks masyarakat pedesaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, secara mayoritas, PPK telah mengenai sasarnya dengan tepat.

Penilaian (*scaling*) tingkat kemiskinan berdasarkan penampakan fisik rumah tidaklah salah 100%. Apalagi ini dikuatkan oleh temuan studi bahwa terdapat hubungan positif antara kondisi fisik rumah responden dengan pendapatan responden (pendapatan diukur dengan *expenditure approach*). Tabel 13 melaporkan adanya *Spearman correlation coefficient* yang positif sebesar 29,1% antara kondisi fisik rumah responden dengan pendapatannya. Artinya, semakin tinggi pendapatan responden, semakin bagus penampakan kondisi fisik rumahnya.

Tabel 13 Hubungan antara Kondisi Rumah dengan Pendapatan

		Kondisi Rumah	Pendapatan
Kondisi Rumah	Correlation Coefficient	1,000	293**
	Sig. (2-tailed)		,000
Sparsman's rho	<i>r</i>	,776	,776
	Correlation Coefficient	293**	1,000
Pendapatan	Sig. (2-tailed)	,000	
	<i>r</i>	,776	,776

(** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Responden yang berpendapatan tinggi cenderung rumahnya berlantakan keramik, berdingkang tembok, berplafon asbes, dan berada di pinggir jalan yang lebar dan beraspal. Sedangkan responden yang berpendapatan rendah cenderung rumahnya beralaskan tanah, berdingkang gubuk atau triplek, dan berada di pinggir jalan yang sempit dan tidak beraspal.

Hubungan antara Pemberdayaan Masyarakat dengan Kemiskinan Analisis Mikro

Dalam bab 5.3, kita mungkin sedikit tidak puas oleh hasil analisis regresi makro tentang hubungan antara alokasi PPK dengan kemiskinan. Ketidapuasan ini mungkin dapat dimaklumi mengingat:

- Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks, tidak bisa dengan serta-merta dijelaskan hanya oleh variabel *PDRB* dan variabel *PPK*.
- Ketersediaan data yang sangat terbatas dan kalupun tersedia datanya sangat agregat utamanya indikator kemiskinan alternatif di Jawa Timur. Padahal statistika mensyaratkan kecukupan data.
- Pola data (*data pattern*) kemiskinan tidak sejalan dengan logika teoretis, dalam arti "gerombolan" data bisa berpola linear (garis lurus), non-linear (garis lengkung), eksponensial, atau bahkan tidak berpola sama sekali.

Oleh karena itu, kami hendak menganalisis hubungan kegiatan PPK dengan kemiskinan berdasarkan data primer yang sudah dihimpun melalui kuesioner (lihat tabulasi data primer dalam LAMPIRAN II dan III). Pertanyaan besar yang hendak dijawab di sini adalah tentang sejauhmana usaha masyarakat dalam memanfaatkan dana PPK melalui kegiatan UEP dan SPP, berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi pemanfaat dana UEP dan SPP. Dalam kalimat lain,

studi ini ingin mencari tahu apakah pinjaman dalam kerangka UEP dan SPP dapat meredakan kemiskinan.

Disarankan (atau dipaksakan) kepada pemanfaat dana UEP maupun SPP untuk berkelompok sebelum mengajukan dana pinjaman. Untuk UEP, keanggotaan kelompoknya bisa berjenis kelamin sama, sedangkan keanggotaan SPP harus berjenis kelamin perempuan. Adalah menarik jika studi ini mengaji ada tidaknya "efek kelompok" dan "efek gender" dalam PPK.

Dalam analisis regresi mikro ini, yang menjadi variabel terikat adalah *misaki*, yaitu besarnya pendapatan responden yang di-*reverse*. Supaya jelas, misalkan pendapatan (*income*) per tahun yang didapat oleh Aili, Nabila, Fatimah, dan Naufal masing-masing adalah Rp1000, Rp800, Rp500, dan Rp400, di mana urutannya menunjukkan bahwa angka terbesar adalah terkaya (Aili) dan angka terkecil adalah termiskin (Naufal).

Kami ingin mengatakan sebaliknya, yaitu angka terbesar adalah termiskin dan angka terkecil adalah terkaya. Oleh karena itu, urutan angka milik Aili, Nabila, Fatimah, dan Naufal masing-masing ditempatkan sebagai pembagi (*denominator*) terhadap angka satu (*numerator*) sehingga secara berurutan menjadi 0,001 (= 1/1000), 0,00125 (= 1/800), 0,002 (= 1/500), dan 0,0025 (= 1/400). Jadi, angka terbesar (0,0025) adalah termiskin (Naufal) dan terkecil (0,001) adalah terkaya (Aili). Inilah yang dimaksud dengan *me-reverse* data.

Sedangkan yang menjadi variabel bebasnya adalah besarnya pinjaman (dalam kerangka UEP atau SPP) yang sudah diavalisasi. Misalkan, pinjaman Rp500.000 berjangka waktu 6 bulan disamakan dengan Rp1.000.000 berjangka waktu 1 tahun. Ini dilakukan untuk menyederagamkan periode *accrual* pendapatan (atau besarnya kemiskinan) dan periode besarnya pinjaman. Hipotesis kami adalah bahwa pemberian pinjaman, baik untuk kegiatan UEP atau SPP, akan mengurangi kemiskinan (atau merambah *income*).

Studi ini memisah *pinjam* menjadi dua variabel, yaitu:

- $PINJAM_{\text{kelompok}}$, yaitu total pinjaman kelompok UEP (atau SPP) tertentu, di mana sebagian daripada pinjaman itu adalah untuk responden anggota kelompok UEP (atau SPP).
- $PINJAM_{\text{individu}}$, yaitu bagian dari pinjaman kelompok UEP (atau SPP) yang menjadi hak anggota tertentu dalam kelompok itu.

Untuk memperjelas perbedaan ini, bayangkan ada kelompok "Mobster" yang beranggotakan 5 orang mendapatkan pinjaman Rp5 juta. Saya (sebagai responden) adalah salah satu anggotanya, mendapatkan jatah Rp1 juta dari Rp5 juta itu, sementara sisanya Rp4 juta adalah jatah yang harus dibagi di antara 4 rekan kelompok saya. Dalam contoh bayangan ini, yang menjadi variabel *pinjaman kelompok* ($PINJAM_{kelompok}$) adalah Rp5 juta sementara *pinjaman individual* ($PINJAM_{individu}$) atas nama saya adalah Rp1 juta. Dari sini, studi ini dapat mencermati "efek kelompok" terhadap pengurangan ke-MISKINan. Mari kita simak hasilnya bersama-sama.

Hubungan antara UEP dengan Kemiskinan

Hubungan antara total *pinjaman kelompok* UEP dengan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut (lihat hasil penghitungannya dengan software EViews dalam LAMPIRAN V):

$$MISKIN_{UEP} = -11,23 - 0,06PINJAM_{kelompok} \quad (3)$$

(14,75) (1,38) $R^2 = 0,007$

persamaan (3) ini mempunyai sign yang benar dan *magnitudo* yang cukup masuk akal, *pinjaman* yang diterima kelompok UEP, dapat menurunkan kemiskinan kelompok UEP itu pada derajat signifikansi 90% (karena $t_{hitung} > t_{tabel}$).

Sedangkan hubungan antara *pinjaman individu* anggota UEP dengan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$MISKIN_{UEP} = -12,62 - 0,04PINJAM_{individu} \quad (4)$$

(23,75) (5,17) $R^2 = 0,005$

persamaan (4) ini juga mempunyai sign yang benar dan *magnitudo* yang cukup masuk akal. Tetapi, secara statistik, *pinjaman* yang diterima individu anggota UEP, tidak dapat menurunkan kemiskinan anggota

kelompok UEP itu (karena $t_{hitung} < t_{tabel}$).

Adalah menarik untuk membandingkan persamaan (3) *vis-à-vis* persamaan (4). Dua persamaan ini memiliki perbedaan sebagai berikut:

- Koefisien variabel *pinjam* atau angka pengganda (*multipplier*) dalam persamaan (3) adalah lebih besar daripada koefisien variabel *pinjam* dalam persamaan (4). Artinya, dengan berkelompok,

magnitudo pengaruhnya lebih besar daripada tidak berkelompok.

- Berdasarkan R^2 -nya, besarnya dari persamaan (3) adalah lebih baik dari persamaan (4). Artinya, variabel dalam UEP lebih bisa menjelaskan kemiskinan daripada variabel.
- Berdasarkan pada derajat kepercayaan 90%, variabel *pinjam* dalam persamaan (3) adalah signifikan, sedangkan dalam persamaan (4) tidak signifikan.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan dalam UEP, adalah lebih elastis (peka) terhadap total *pinjaman kelompok* ketimbang *pinjaman individual*. Dengan berkelompok dalam UEP, masyarakat akan menjadi lebih mampu melawan kemiskinan.

Hubungan antara SPP dengan Kemiskinan

Hubungan antara total *pinjaman kelompok* SPP dengan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut (lihat hasil penghitungannya dengan software EViews dalam LAMPIRAN V):

$$MISKIN_{SPP} = -11,23 - 0,12PINJAM_{kelompok} \quad (5)$$

(15,04) (2,83) $R^2 = 0,02$

ekonomika, persamaan (5) ini mempunyai sign yang benar dan *magnitudo* yang cukup masuk akal. 1 unit *pinjaman* yang diterima kelompok SPP, dapat menurunkan kemiskinan kelompok SPP itu sebesar 0,12 unit pada derajat kesalahan sebesar 0,5% (karena $t_{hitung} > t_{tabel}$).

Sedangkan hubungan antara *pinjaman individu* anggota SPP dengan tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$MISKIN_{SPP} = -12,62 - 0,18PINJAM_{individu} \quad (6)$$

(12,75) (3,44) $R^2 = 0,10$

dengan $n = 257$. Secara *a priori*, persamaan (6) ini juga mempunyai sign yang benar dan *magnitudo* yang cukup masuk akal. Secara statistik, 1 unit *pinjaman* yang diterima suatu individu anggota SPP, dapat menurunkan kemiskinan anggota kelompok SPP itu sebesar 0,18 unit pada derajat kesalahan sebesar 0,5%.

Jika kita membandingkan persamaan (5) *vis-à-vis* persamaan (6), kita mendapatkan perbedaan

sebagai berikut:

- Koefisien variabel *pinjam* atau angka pengganda dalam persamaan (6) adalah lebih besar daripada koefisien variabel *pinjam* dalam persamaan (5). Artinya, kemampuan individu/anggota dalam meminjam, adalah lebih besar dari-pada kemampuan kelompok.
- Berdasarkan R^2 -nya, besarnya dari persamaan (6) adalah lebih baik dari persamaan (5). Artinya, variabel dalam SPP lebih bisa menjelaskan ketertarikan daripada variabel.
- Berdasarkan pada derajat kesalahan sebesar 0,5%, variabel *pinjam* dalam persamaan (5) dan (6) adalah sama-sama signifikan.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pengurangan komisikoran dalam SPP, adalah lebih elastis (jeka) terhadap *pinjaman* anggota ketimbang total *pinjaman* kelompok. Dengan lebih mandiri, kaum perempuan masyarakat menjadi lebih mampu melawan komisikoran.

Sejauk kita mungkin dibingungkan oleh persamaan-persamaan yang berserpihan dalam bab 5.3. Oleh karena itu, mari kita simak hasil rekapitulasinya dalam Tabel 14. Tampak bahwa pengaruh *pinjaman* individual maupun kelompok dalam kerangka SPP adalah signifikan, tetapi efek individualnya lebih besar daripada efek kelompoknya. Lebih lanjut, *group effect* juga terjadi dalam UEP; oleh karena *pinjaman* individual tidak berpengaruh sementara *pinjaman* kelompok berpengaruh signifikan. Sanggupan demikian, kita bisa mengatakan bahwa secara rata-rata, *pinjaman* dapat meningkatkan pengeluaran sebesar 0,10 (= $0,05 \times 2$). Artinya, jika Naufal meminjam dana PPK sebesar Rp1.000.000, maka peningkatan pendapatan karena dana pinjaman ini adalah sebesar Rp100.000 (= Rp1.000.000 x 0,10).

Mengapa SPP Lebih Berdampak Ketimbang UEP?

Mari disimak dan dibandingkan persamaan (5) dengan persamaan (3) dalam Tabel 14 tampak bahwa besarnya pengaruh *pinjaman* kelompok dalam kerangka SPP (0,12) adalah lebih besar dibanding dalam kerangka UEP (0,06). Mengapa? Ada dua hal yang kami duga bisa menjelaskan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu faktor tanggakan dan faktor beban utang.

Tabel 14 Perbandingan Besarnya Dampak UEP dan SPP

Persamaan	Hasil Regresi	Statistika Statistik
3	$WEEK_{t+1} = -11,23 - 0,06PINJAM_{t+1}$ (11,75) (1,88) $F^* = 0,001$	Pengaruh <i>pinjaman</i> signifikan
4	$WEEK_{t+1} = -11,42 - 0,06PINJAM_{t+1}$ (11,75) (1,17) $F^* = 0,001$	Pengaruh <i>pinjaman</i> tidak signifikan
5	$WEEK_{t+1} = -11,23 - 0,12PINJAM_{t+1}$ (11,64) (1,83) $F^* = 0,01$	Pengaruh <i>pinjaman</i> signifikan, tetapi tidak ada ketertarikan lebih yang ditunjukkan <i>pinjaman</i> ini
6	$WEEK_{t+1} = -11,48 - 0,12PINJAM_{t+1}$ (11,75) (1,44) $F^* = 0,01$	Pengaruh <i>pinjaman</i> signifikan, tetapi tidak ada ketertarikan lebih yang ditunjukkan <i>pinjaman</i> ini

Faktor Tanggakan. Kita harus ingat bahwa dana UEP adalah *revolving fund*. Artinya, ketika saya sebagai nasabah meminjam dana UEP menunggak pembayaran cicilan, maka keinginan Anda untuk memanfaatkan dana ini akan tertunda untuk diwujudkan. Semakin lama umur tanggakan saya, semakin besar jumlah tanggakan saya, lebih-lebih semakin banyak orang lain yang menunggak, maka semakin tertunda keinginan Anda akan terwujud. Data kami menunjukkan bahwa peristiwa tanggakan lebih sering terjadi dalam penggalangan dana UEP ketimbang dana SPP (lihat Tabel 15). Tampaknya, faktor tanggakan ini saling berkaitan dengan faktor beban pinjaman.

Tabel 15 Tanggakan Responden UEP dan Responden SPP

	Pokok	Tidak pokok	Jumlah
Responden UEP	34 (12%)	249 (88%)	283 (100%)
Responden SPP	24 (8,2%)	264 (91,8%)	288 (100%)

Sumber: Lampiran D dan F1, ditolah

Faktor Beban Utang. Tabel 16 melaporkan bahwa ada 17,37% responden UEP dan 14,72% responden SPP mempunyai pinjaman di tempat lain (misalkan, di BPR atau koperasi). Kalau saya meminjam dana UEP sekaligus dana dari bank atau koperasi misalkan, maka kemungkinan saya untuk menunggak pembayaran cicilan akan semakin besar. Dalam kata lain, semakin banyak utang saya, semakin saya terbebani, dan semakin besar kemungkinan saya untuk menunggak pembayaran cicilan dana UEP. Jika demikian, jika Anda ingin memanfaatkan dana UEP, waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dana ini menjadi semakin lama.

Tabel 16 Beban Utang Responden UEP dan Responden SPP

	Tu	Tidak	Jumlah
Responden UEP	49 (17,3%)	233 (82,7%)	282 (100%)
Responden SPP	43 (14,3%)	260 (85,7%)	293 (100%)

Kembali kepada pertanyaan mengapa SPP lebih berdampak ketimbang UEP. Jawaban secara ringkas dari uraian di atas adalah:

- Kinerja tanggapan SPP lebih baik ketimbang UEP.
- Pemanfaat dana UEP lebih terbebani utang ketimbang pemanfaat dana SPP.

Mengapa dana SPP lebih Diminati ketimbang DANA UEP?

Dibanding dana UEP, telah terbukti secara empiris bahwa dana SPP lebih kuat pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan (atau peningkatan pengeluaran). Pengaruh ini, sebagaimana dijelaskan dalam bab 5.5 ternyata berkaitan dengan kinerja cicilan dan beban utang nasabah. Kinerja cicilan SPP lebih baik daripada UEP, dan beban utang nasabah UEP lebih tinggi dibanding nasabah SPP.

Dua 'perjelat' ini tampaknya saling berkaitan jika kami tidak ingin mengatakan saling mengunci (*interlock*). Semakin tinggi beban utangnya, semakin tinggi kemungkinannya untuk menunggak pembayaran cicilan utang itu. Sebaliknya, semakin lama umur dan besar tanggukannya, semakin berat beban utangnya. Fenomena ini terjadi dalam UEP, tidak (atau mungkin belum) dalam SPP.

Dua perjelat, ini, saling berkaitan dan secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap lartanya 'waktu tunggu' bagi pihak lain jika hendak mengakses dana UEP. Anggapih saja sebagai anggota kelompok UEP bernama "Mobster," dan Anda sedang mengantri untuk mendapatkan jatah penggaliran dana UEP yang enak mendapatkan dan kompetitif. *You depend on me*. Asumsikan bahwa saya menunggak pembayaran cicilan.

Semakin lama umur tanggukan cicilan UEP yang harus saya bayarkan, semakin besar jumlah tanggukan itu, lebih-lebih semakin banyak nasabah UEP lain (tidak hanya saya) yang menunggak, maka semakin lama waktu tunggu Anda untuk mewujudkan impian lama untuk mendapatkan dana pinjaman UEP. Di samping itu, semakin banyak utang saya, semakin saya terbebani, maka semakin besar kemungkinan saya untuk menunggak pembayaran cicilan dana UEP

sedemikian rupa sehingga semakin besar kemungkinan lamanya waktu untuk mengantri dana UEP.

Kami yakin bahwa hampir semua orang tidak betah untuk menunggu. Katanya, *waiting is boring*. Ketika Anda menunggu, dan Anda tidak mempunyai pilihan lain, maka Anda akan menyebarkan diri untuk menunggu. Tetapi, jika tersedia pilihan alternatif, dan anda didesak oleh kebutuhan apalagi 'keinginan' maka Anda cenderung berusaha payah untuk mengakses pilihan itu. Pilihan alternatif yang dimaksud di sini adalah dana SPP. Daripada Anda menunggu lama untuk mendapatkan dana UEP, Anda mencoba mengantri di SPP.

Pengaruh Berkelompok terhadap Tunggakan

Semua sarjana Ilmu sosial sepakat bahwa manusia cenderung berkelompok dengan manusia lainnya. Berkelompok bisa dilakukan secara sukarela (seperti menjadi anggota partai politik di negara demokratis), atau secara paksaan (seperti sekumpulan tahanan dalam blok sel penjara). Kelompok bisa dibentuk secara informal (seperti kelompok pengajian) atau secara formal (seperti Badan Sarjana Ekonomi Indonesia). Kelompok bisa terbentuk secara spontan (seperti kelompok supporter sepak bola di sebuah tribun lapangan sepak bola), atau *organized* (seperti kelompok demonstran). Kami hendak mengatakan bahwa setiap kelompok memiliki tujuan, apapun macam atau jenis sebuah kelompok dan bagaimanapun kelompok itu terbentuk, mulai dari berkelompok untuk melindungi anggota-anggotanya dari serangan binatang buas atau berkelompok untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu.

Salah satu keunikan PPK adalah adanya persyaratan bagi calon peminjamnya untuk berkelompok untuk memenangkan dana UEP dan SPP. Keanggotaan kelompok dalam UEP maupun SPP tidak bersifat paksaan atau "teknis" kumpul-kumpul. Baik kelompok UEP maupun SPP mempunyai satu tujuan yaitu memenangkan dana pinjaman PPK untuk dibagikan kepada anggota-anggotanya dan kemudian memper-tanggungjawabkan dana pinjaman itu secara berkelompok.

Meskipun kelompoknya adalah informal dan keanggotaannya bersifat sukarela, tetapi segera setelah Anda mendapatkan pinjaman PPK *via* kelompok, maka Anda tidak dapat lari (*exit*) dari kelompok itu sebelum Anda melunasi pinjaman itu. Anda berada dalam situasi asosiatif yang memaksa Anda (dan juga

teman-teman Anda dalam kelompok Anda) untuk mengkoordinasikan diri dalam 'pola transaksi utang-piutang' sebagai berikut:

- Jika Anda mendapatkan pinjaman, maka anda harus melunasinya di kemudian hari.
- Jika Anda menunggak pembayaran cicilan, sampai batas waktu tertentu, Anda dibolehkan untuk menunda pembayaran cicilan, atau Anda akan didenda.
- Jika sampai batas waktu tertentu anda masih menunggak, Anda akan ditagih secara intensif.
- Jika Anda dinyatakan tidak mampu lagi mencicilya atau melunasinya, maka kelompok akan menanggungnya.

Realitas dalam transaksi utang-piutang selalu menempatkan sifat memaksa (*imperative*) dan tegas yaitu "utang harus dibayar" sedemikian rupa sehingga menempatkan semua anggota kelompok UEP atau SPP tertentu dalam sebuah *imperatively coordinated association*.

Basis pembentukan kelompok UEP secara seksual berbeda dengan kelompok SPP. Keanggotaan UEP terdiversifikasi secara jenis kelamin, sedangkan anggota kelompok SPP haruslah berjenis kelamin perempuan. Kami hendak mengatakan bahwa sebuah kelompok SPP tertentu lebih mampu mengkoordinasikan dirinya secara *imperative* dibanding sebuah kelompok UEP tertentu. Argumen ini berdasarakan fakta dalam Tabel 17 dan 18.

Tabel 17 Hubungan antara Frekuensi Kehadiran dalam Kelompok UEP dengan Frekuensi Tunggakan

UEP	Tunggakan	Korelasi (uji-t)	
		1-tail	2-tail
Speman's rho	Frekuensi	-.136*	.271
	0	.271	.271
Muda dalam pertemuan	Frekuensi	-.136*	.271
	0	.271	.271

(* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Tabel 17 dapat dibandingkan dengan Tabel 18. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan kelompok berkorelasi negatif dengan frekuensi tunggakan. Artinya, semakin sering hadir dalam pertemuan kelompok, semakin kecil kemungkinan menunggak. Korelasi antara frekuensi kehadiran dalam pertemuan dengan frekuensi tunggakan, ternyata lebih kuat dalam SPP dibanding dalam UEP.

Dibanding kelompok UEP, kelompok SPP lebih mampu memaksa anggota-anggotanya untuk membayar. Frekuensi kehadiran kelompok anggota UEP mempunyai *Spearman correlation* dengan frekuensi tunggakan sebesar $-0,134$ (lihat Tabel 17). Sedangkan frekuensi kehadiran kelompok anggota SPP mempunyai *Spearman correlation* dengan frekuensi tunggakan sebesar $-0,208$ (lihat Tabel 18). Ini berarti kekuatan *group coordination* dalam memperkecil tunggakan, adalah lebih bekerja (*imperative*) dalam SPP ketimbang dalam UEP.

Tabel 18 Hubungan antara Frekuensi Kehadiran dalam Kelompok SPP dengan Frekuensi Tunggakan

SPP	Tunggakan	Korelasi (uji-t)	
		1-tail	2-tail
Speman's rho	Frekuensi	-.208**	.031
	0	.031	.031
Muda dalam pertemuan	Frekuensi	-.208**	.031
	0	.031	.031

Mengapa *group coordination* dalam SPP sedemikian *imperative*? Ada dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu:

Kita semua sepakat bahwa dalam kultur masyarakat pedesaan, kaum perempuan diminta untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah untuk menyelesaikan masalah-masalah domestiknya. Perempuan diminta untuk menyiapkan sarapan pagi sebelum suaminya keluar rumah mencari nafkah, hingga menyiapkan air mandi hangat untuk menyambut kedatangan suaminya di sore/malam hari. Kaum perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang lebih besar dibanding kaum laki-laki. Perasaan bertanggungjawab ini membuat mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya.

Peran domestik ini memungkinkan kaum perempuan pedesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi *social coordination* bisa lebih sering terjadi. Jika ibu Fatimah mempunyai peran domestik yang besar dalam rumah tangganya sehingga mobilitasnya menjadi rendah dan perjumpaannya dengan anggota kelompoknya tidak begitu sulit, maka tunggakan utang/cicilannya akan semakin membebani psikologinya. Sulit bagi Fatimah untuk bersembunyi-sembunyi di dalam rumah karena takut ditagih, sementara ia paling tidak harus belanja di pasar pagi. Sulit juga bagi

Fatimah untuk tidak menghadiri undangan rapat kelompok di malam hari dengan alasan ia merasa capek setelah bekerja lembur sebanh.

Kita pasti juga sepakat bahwa perasaan perempuan umumnya lebih sensitif dibanding pria. Perempuan, pada umumnya, lebih peka terhadap masalah-masalah domestiknya dibanding laki-laki. Perempuan lebih tabu dan peka terhadap kebutuhan sandang dan biaya sekolah anaknya, kebutuhan gizi dan kesehatan keluarganya, dan terhadap tingkat kebersihan lingkungan rumahnya. Kepekaan ini biasanya terlatih dan terbawa secara turun temurun (*historically transmitted*), artinya dari ibu kepada anak perempuannya dan kemudian kepada cucu perempuannya.

Ketika 'para perempuan semacam ini' diletakkan dalam sebuah kelompok tertentu, maka pada derajat tertentu jiwa perasanya terbawa dan terpelihara dalam kelompok itu. Tentu saja 'derajat perasaannya' yang terpelihara tergantung pada macam kelompoknya. Ibu Fatimah akan lebih memelihara perasaannya dalam kelompok lokal-kultural (seperti jama'ah tabii, jama'ah yasin, atau jama'ah diba'), dibanding dalam kelompok rasional (seperti partai politik atau organisasi profesi yang beranggotakan para perempuan).

Kebanyakan kelompok SPP terbentuk secara lokal-kultural, sehingga dimungkinkan terjadinya fungsi kontrol yang dapat menyentoh perasaan perempuan. Misalnya, jika ibu Fatimah belum membayar cicilan, rekan kelompoknya mungkin tidak mengahinya secara eksplisit, melainkan dengan sindiran. Kalupun ditagih secara eksplisit, rekan-rekan kelompoknya mungkin berujar (dalam bahasa Jawa): "*Ayo bu, ndang dibayar!*" Atau, "*Dava Ibu nek gak dibayar!*" Bagi ibu Fatimah, sindiran atau ujaran-ujaran semacam ini, bisa mengintimidasi perasaannya dan membangkitkan rasa malu atau sungkan, sedemikian rupa sehingga cukup memaksa ia memikirkan cara bagaimana membayarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah berdiskusi panjang lebar dalam bab Hasil Evaluasi, dapatlah kiranya sekarang ditarik beberapa kesimpulan. Sebelumnya, tidak ada salahnya jika kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan studi ini, yaitu: (1) Memastikan apakah PPK sudah tepat sasaran; (2) Mengukur besarnya pengaruh penyaluran dana PPK terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat di Jawa Timur; (3) Mengukur besarnya pengaruh digalirkannya dana pinjaman PPK dalam rangka UEP dan SPP terhadap peningkatan pendapatan 'nasabah' UEP dan SPP.

Apakah PPK—yang ditujukan kepada masyarakat miskin—sudah tepat sasaran? Jawabnya adalah: "Ya!" Mari disimak temuan berikut ini:

- Ada 52,43% dari 576 responden penerima dana UEP dan SPP bertempat tinggal dalam rumah yang beralaskan tanah dan plester.
- 31,6% (= 6,42% + 5,73% + 19,44%) dari 576 responden itu menghuni rumah yang ber dinding bambu dan/atau triplek.
- 70,03% (= 53,94% + 6,83% + 9,28%) dari 571 itu menempati rumah tanpa plafon. Kalaupun ada plafonnya, plafon itu terbuat dari bambu (*grogol*) dan/atau triplek.
- 52,43% (= 28,3% + 19,1% + 5,03%) dari 576 responden itu menghuni rumah di tepi jalan tidak beraspal, seperti jalan tanah (28,3%), jalan batu (19,1%) dan jalan cor (5,03%).
- 87,15% (= 6,25% + 25,35% + 55,56%) dari 576 responden itu menghuni rumah di tepi jalan setapak (6,25%), jalan 1–2 meter (25,35%), dan jalan 2–4 meter (55,56%).

Berdasarkan temuan ini kita bisa beranggapan bahwa mayoritas penerima dana UEP dan dana SPP adalah orang miskin jika kita enggan untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang sangat miskin.

Mungkin ada yang tidak puas dengan temuan kami dan kemudian mengatakan: "berapa persen responden yang rumahnya *seka/gas* berlantakan tanah, ber dinding bambu, tanpa plafon, dan berada di jalan setapak yang sempit?" Sebut saja pertanyaan ini mencari tahu jumlah responden yang berstatus "sangat miskin." Atau sebalikny, "berapa persen responden yang rumahnya *seka/gas* berlantakan keramik, ber dinding tembok, berplafon abes, dan berada di tepi jalan beraspal yang lebar?" Sebut saja pertanyaan ini mencari tahu jumlah responden yang berstatus "kaya." Jika di antara "sangat miskin" dan "kaya" dipekerjakan dan dikalakan, kita akan mendapatkan sebuah skala kemiskinan: (1) sangat miskin, (2) miskin, (3) cukup (tidak kaya dan tidak miskin), dan (4) kaya.

Berdasarkan *scaling* ini, ditemukan bahwa 58,2% (= 10,94% + 47,37%) dari 576 responden itu adalah masuk kategori sangat miskin (10,94%) dan miskin (47,37%). Sedangkan sisanya, 41,49% (=

38,89% + 2,6%) dari 578 responden, masuk kategori cukup (38,89%) dan kaya (2,6%). Tentu saja kategori "cukup" dan "kaya" yang dimaksud di sini adalah dalam konteks masyarakat pedesaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, secara mayoritas dan tegas, PPK telah mengenal sasarnya dengan tepat.

Mungkin di antara kita ada yang mengugat kelayakan indikator kemiskinan dilihat dari "tingkat kebugusan" rumah responden. Studi ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kondisi fisik rumah responden dengan pendapatan responden. Ada *Spearman correlation coefficient* yang positif signifikan sebesar 28,1% antara kondisi fisik rumah responden dengan pendapatannya. Artinya, semakin tinggi pendapatan responden, semakin baik/bagus kondisi fisik rumahnya. Artinya, kondisi fisik rumah responden cukup layak dan kuat untuk dijadikan sebagai proxy kemiskinan.

Setelah PPK dievaluasi "tepat sasaran" dan mampu mengentaskan 43.678 penduduk miskin, pertanyaan berikutnya adalah: "Berapa besarnya dampak pinjaman dana UEP dan SPP terhadap peningkatan pendapatan penerima pinjaman dana itu?" Studi ini menyimpulkan bahwa dana pinjaman itu dapat menghasilkan *additional income* bagi peminjamnya rata-rata sebesar 0,10 per tahun. Artinya, jika seseorang meminjam dana PPK sebesar Rp1.000.000, maka peningkatan pendapatan karena dana pinjaman ini adalah sebesar Rp100.000 (= Rp1.000.000 x 0,10) per tahun.

Lebih jauh, studi ini menemukan bahwa besarnya pengaruh pinjaman kelompok SPP (0,12) adalah lebih besar dibanding dalam kelompok UEP (0,06). Demikian ini membangkitkan pertanyaan: "Dibanding pinjaman UEP, Mengapa pinjaman SPP lebih berdampak terhadap peningkatan *Additional income*?"

Ada dua hal yang diduga bisa menjelaskan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu faktor tanggakan dan faktor beban utang:

- Faktor Tanggakan. Ada 8,2% responden SPP dan 12% responden UEP yang menjawab "pernah" menanggung. Hal ini bisa diartikan bahwa "kinerja tanggakan" SPP lebih baik ketimbang UEP.
- Faktor Beban Utang. Ada 14,72% responden SPP dan 17,37% responden UEP mempunyai pinjaman di tempat lain (seperti BPR atau koperasi). Artinya, responden UEP lebih terbebani utang ketimbang responden SPP.

Dua "penjelas" ini saling berkaitan, bahkan *interlocking*. Semakin tinggi beban utangnya, semakin tinggi kemungkinannya untuk menanggung pembayaran cicilan utang itu. Sebaliknya, semakin lama umur dan besar tanggakannya, semakin berat beban utangnya.

Di samping itu, faktor tanggakan dan beban utang di atas dapat menjelaskan secara psikologis atas pertanyaan: "Mengapa dana SPP lebih diminati ketimbang dana UEP?" Dua faktor ini dapat saling berkaitan (*interlocking*), tetapi dapat pula secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap lamanya waktu tunggu untuk mengantar dana UEP.

Semakin lama umur tanggakan cicilan UEP, semakin besar jumlah tanggakannya, lebih-lebih semakin banyak peminjam UEP lain yang menanggung, maka semakin lama waktu tunggu bagi calon peminjam UEP untuk mendapatkan dana pinjaman UEP. Di samping itu, semakin banyak utang peminjam, semakin ia terbebani, maka semakin besar kemungkinannya ia untuk menanggung pembayaran cicilan dana UEP sedemikian rupa sehingga semakin besar kemungkinan lamanya waktu tunggu bagi calon peminjam untuk mendapatkan dana UEP.

Hampir semua orang tidak betah untuk menanggung. Ketika kita menanggung, dana kita tidak mempunyai pilihan lain, maka kita akan menyebarkan diri untuk menanggung. Tetapi, jika ada sebuah pilihan alternatif, dan kita didesak oleh kebutuhan apalagi "keinginan" maka kita cenderung berusaha payah untuk mengakesi pilihan alternatif itu. Pilihan alternatif yang dimaksud di sini adalah dana SPP. Ini adalah "alasan psikologis" mengapa SPP lebih menarik ketimbang UEP.

Adapun "alasan rasional" mengapa SPP lebih diminati dibanding UEP adalah:

- Jumlah dana yang dialokasikan untuk UEP dikendalikan oleh jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk sarana/prasarana, semakin kecil ketersediaan dana untuk UEP. Sementara keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP.
- Pengorganisasian kelompok SPP relatif lebih mudah dibanding kelompok UEP. Untuk memenangkan dana UEP, masyarakat harus membentuk kelompok usaha bersama. Sedangkan pengorganisasian kelompok SPP lebih mudah dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal baik

formal maupun informal yang sudah ada dalam masyarakat seperti kelompok jama'ah tabligh, kelompok posyandu, atau kelompok PKK.

- Kelompok SPP boleh mengakses dana PPK baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif seperti untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Sedangkan alokasi dana UEP diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang produktif.

Bisa jadi "alasan psikologis" dan "alasan rasional" di atas dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada dan bersifat hipotesis belaka. Untuk merespons cibiran ini, kami meminta 566 responden untuk membandingkan UEP *vis-a-vis* SPP. Responden menjawab bahwa (a) SPP (63%) lebih mudah dibanding UEP (35%); (b) UEP (39,5%) lebih rumit dibanding SPP (40,5%); (c) SPP (33,6%) lebih menguntungkan dibanding UEP (44,4%); dan (d) SPP (64,7%) lebih baik dibanding UEP (35,3%) karena adanya simpanan. Persepsi responden mengatakan bahwa dibanding UEP, SPP lebih mudah, lebih tidak rumit, lebih menguntungkan, dan lebih baik karena adanya simpanan (*saving*).

Diharapkan bagi pemanfaat dana UEP maupun SPP untuk berkelompok dalam mengajukan dana pinjaman, kemudian senantiasa mengkoordinasikan anggota-anggota kelompok dalam mengelola pinjaman itu. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah: "apakah frekuensi pertemuan kelompok berpengaruh terhadap frekuensi tanggakan?" Di samping itu, diketahui bahwa UEP berbeda secara seksual dari SPP. Untuk UEP, keragaman kelompoknya bisa berjenis kelamin sama atau berbeda, sedangkan keragaman SPP harus berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, pertanyaan-annya adalah: "Adakah perbedaan tingkat *group coordination* dalam SPP *vis-a-vis* UEP?"

Dibanding kelompok UEP, kelompok SPP lebih mampu memaksa anggota-anggotanya untuk membayar. Frekuensi kehadiran kelompok anggota UEP mempunyai *Spearman correlation* dengan frekuensi tanggakan sebesar $-0,154$ (lihat Tabel 17). Sedangkan frekuensi kehadiran kelompok anggota SPP mempunyai *Spearman correlation* dengan frekuensi tanggakan sebesar $-0,208$. Ini berarti kekuatan *group coordination* dalam memperkecil tanggakan, adalah lebih bekerja (*imperative*) dalam SPP ketimbang dalam UEP.

Mengapa *group coordination* dalam SPP sedemikian *imperative*? Ada dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu:

Dalam kultur masyarakat pedesaan, kaum perempuan dituntut untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah untuk menyelesaikan masalah-masalah domestikinya. Perasaan bertanggungjawab ini membuat mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran domestik ini memungkirkan kaum perempuan pedesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi *social coordination* bisa lebih sering terjadi.

Perempuan, pada umumnya, lebih peka terhadap masalah-masalah domestikinya dibanding laki-laki. Kepakaan ini biasanya terlatih dan terbawa secara turun temurun (*historically transmitted*), utamanya dari ibu kepada anak perempuannya dan kemudian kepada cucu perempuannya. Ketika "para perempuan semacam ini" diletakkan dalam sebuah kelompok SPP tertentu yang berbasis lokal-kultural, maka pada derajat tertentu jiwa perasannya terbawa dan terpelihara dalam kelompok itu. Perempuan akan lebih memilih untuk memikirkan cara bagaimana membayar utang kepada kelompoknya, daripada memilih untuk menerima rasa malu atau sungkan karena menunggak utang itu.

Saran

Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil studi ini (termasuk tim peneliti), kami memberikan saran sebagai berikut:

Studi ini menyadari akan keterbatasan data sekunder yang ada, yang biasanya disediakan oleh BPS. Analisis makro dengan data *time series* per kabupaten, mungkin akan lebih mampu memotret dampak PPK per kabupaten serta membandingkan dampak itu di antara satu kabupaten *vis-a-vis* kabupaten yang lain. Hal ini dapat dilakukan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Akan tetapi, ini bergantung pada kredibilitas data sekunder yang ada.

Oleh karena PPK adalah untuk si miskin dan kemiskinan merupakan fakta objektif yang dinamis, maka upaya pemotretan secara mikro dan kontinu terhadap kemiskinan dapat menjadi bagian integral dalam kegiatan konsultan PPK. Jika ini dilakukan, studi-studi berikutnya akan mampu membandingkan tingkat kemiskinan "sebelum PPK" dengan "setelah PPK".

Studi dibatasi masalahnya pada kemiskinan dalam kaitannya dengan kegiatan SPP atau UEP. Akan lebih menarik jika peneliti-peneliti berikutnya

menghitung peningkatan pendapatan masyarakat desa/kecamatan tertentu, yang diakibatkan oleh, misalnya, adanya pembangunan jembatan atau pasar oleh PPK.

Ada beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang perlu diurai, seperti pertanyaan tentang kondisi atap genteng rumah responden dan sarana komunikasi responden. Genteng perlu diklasifikasi lebih rinci, bukan sekadar genteng versus asbes. Pertanyaan tentang keberadaan telepon sebagai sarana komunikasi responden bisa diuraikan dengan pertanyaan: "Berapa kali dalam seminggu responden menggunakan telepon?", "Telepon rumah atau wartel?", "Menggunakan telpon untuk keperluan keluarga atau bisnis?", "Apakah mempunyai HP?", dan seterusnya. Semakin rinci pertanyaan dalam kuesioner, semakin permis kita memastikan apakah responden miskin atau tidak.

DAFTAR RUJUKAN

- Geertz, C. 1973. *Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gujarati, D.N. 1995. *Basic Econometrics*, Edisi 3. New York: McGraw-Hill.
- Holtsade, G. 1994. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. London: Harper-CollinsPublisher.
- Keller, G., Brian, W., and Bartel, H. 1990. *Statistics for Management and Economics: A Systematic Approach*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (2005), "Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Tahun 2005," *Laporan Penelitian*.
- Meist, G.M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford Univ. Press.
- Saaty, T.L. 1992. *MultiCriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process*. Pittsburgh: RWS Publications.
- Sen, A. 1985. *Commodities and Capabilities*. Hemispen Lectures in Economics, Vol. 7. Amsterdam: North-Holland.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukimo, S. 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. 2005. *Penunjuk Teknik Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PTO PPK)*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Trainor, T. 2002. "Development, Charity and Poverty: The Appropriate Development Perspective," *International Journal of Social Economics*, Vol. 29, No. 1/2, hlm. 54-72.

Etika Ekonomi (Bisnis) dalam Menghadapi Pasar Bebas

Bambang Satriya

Analisis tentang Profesionalisme Aparatur dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah

Zaidan Nawawi

Pengaruh Kepemimpinan, Internal Organisasi, Kondisi Perekonomian, Regulasi Pemerintah, Perpajakan terhadap Produktivitas pada Usaha Kecil Industri Sigaret Kretek Tangan (UKI SKT) di Jawa Timur

Bambang Suryantoro

Model Struktural Pengelolaan Sampah di Luar Kawasan Pelayanan Persampahan di Kabupaten Gresik

Any Nursiwati

Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Tingkat Suku Bunga SBI dan Biaya Manajemen terhadap Unit Penyertaan Reksa Dana Kustini

Analisis Kualitas Layanan, Kepuasan, dan Kepercayaan Nasabah pada Bank Syariah di Kota Makassar

Syamsul Bachri

Pola Asuh Orang Tua yang Membentuk Jiwa Wirausaha Anak: Sebuah Studi pada Mahasiswa Teknik Industri ITS Surabaya

Bustanul Arifin Noer, Budisantoso Wirjodirdjo

Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Pemasaran di Supermarket XYZ Surabaya

Budi Santoso

Analisis tentang Unit Usaha Pelayanan Jasa untuk Mesin Pertanian Teguh Soedarto

JEM	Vol. 8	No. 2	Hlm. 173-384	Malang Juni 2007	ISSN 1411-5794
-----	--------	-------	--------------	---------------------	-------------------

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN

(Journal of Economics and Management)

Terhitung sejak tahun 2005 *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* terbit tiga kali setahun (**Februari, Juni dan Oktober**) ISSN: 1411-5794, berisi tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, resensi buku dan tulisan praktis dalam bidang ekonomi dan manajemen.

Jurnal Ekonomi dan Manajemen telah terakreditasi sebagai Jurnal/
Majalah ilmiah berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor 39/DIKTI/Kep/2004
Tanggal 10 November 2004

Ketua Penyunting
Abdul Halim

Wakil Ketua Penyunting
Teguh Prasetyo

Penyunting Pelaksana
Djuni Farhan
Nurhanifan
Sugeng Mulyono
Umi Muawanah

Penyunting Ahli
Bambang Subroto (Guru Besar FE-Universitas Brawijaya Malang)
Amiruddin Umar (Guru Besar FE-Universitas Airlangga Surabaya)
J.G. Nirbito (Guru Besar FE-Universitas Negeri Malang)
Dyah Sawitri (Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang)
Jose Rizal Joesoef (Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang)

Mitra Bestari
Supriyanto (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Penyunting Tamu
Suroso Imam Zadjuli (Guru Besar FE-Universitas Airlangga Surabaya)
Prjono Tjigtoharjanto (Guru Besar FE-Universitas Indonesia)

Pelaksana Tata Usaha
Ronny Hendra Hertanto

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Manajemen (MM) Universitas Gajayana Malang, Jl. Mertojoyo Blok L, Malang 65144, Indonesia. Telepon (0341) 562411, Fax. (0341) 582168. E-mail: jurnaluniga@telkom.net.

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN (JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT) diterbitkan oleh Program Studi Magister Manajemen (MM) Program Pasca Sarjana Universitas Gajayana Malang.

Dicetak oleh:

PENERBIT PERCETAKAN (UH PRESS)

Jl. Gembong 1 Malang 65145 Tlp. (0341) 557959, 562290 Fax. 566025
Website: <http://www.malang.ac.id> E-mail: penerbit@malang.ac.id

JURNAL

EKONOMI DAN MANAJEMEN

Journal of Economics and Management

Volume 8, Nomor 2

Juni 2007

DAFTAR ISI

Etika Ekonomi (Bisnis) dalam Menghadapi Pasar Bebas <i>Bambang Satriya</i>	173-182
Analisis tentang Profesionalisme Aparatur dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah <i>Zaidan Nawawi</i>	183-191
Pengaruh Kepemimpinan, Internal Organisasi, Kondisi Perekonomian, Regulasi Pemerintah, Perpajakan terhadap Produktivitas pada Usaha Kecil Industri Sigaret Kretek Tangan (UKI SKT) di Jawa Timur <i>Bambang Suryantoro</i>	192-201
Model Struktural Pengelolaan Sampah di Luar Kawasan Pelayanan Persampahan di Kabupaten Gresik <i>Any Nursirwati</i>	202-215
Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Tingkat Suku Bunga SBI dan Biaya Manajemen terhadap Unit Penyertaan Reksa Dana <i>Kastini</i>	216-224
Analisis Kualitas Layanan, Kepuasan, dan Kepercayaan Nasabah pada Bank Syariah di Kota Makassar <i>Syamsul Bachri</i>	225-235
Pola Asuh Orang Tua yang Membentuk Jiwa Wirasaha Anak: Sebuah Studi pada Mahasiswa Teknik Industri ITS Surabaya <i>Bustamal Arifin Nover, Budiantono Wijayodirdjo</i>	236-251
Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Pemasaran di Supermarket XYZ Surabaya <i>Budi Santoso</i>	252-258
Pengaruh Aliran Kas Bebas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Utang dan <i>Collateral Asset</i> terhadap Kebijakan Dividen <i>Achmad Faza, Rosidi</i>	259-267

Analisis tentang Unit Usaha Pelayanan Jasa untuk Mesin Pertanian <i>Teguh Soedarto</i>	268-276
Penerapan <i>Profit Sensitivity Analysis</i> untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perbankan <i>Hariyanto Agus Sarati, Eko Parwadi Lelono</i>	277-287
Pengaruh Penerapan <i>Total Quality Management</i> terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel <i>Moderating</i> pada PT Pertamina (Persero) UPMS V Surabaya <i>Dwi Suhartini</i>	288-297
Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa pada Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Jasa Bengkel Sepeda Motor Yogyakarta) <i>Iyuk Yuliana, Farida Muatikawati</i>	298-309
Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Saham Perusahaan Manufaktur yang <i>Go Public</i> di Bursa Efek Jakarta <i>Nuryanti Takarini</i>	310-318
Profil Pekerja Wanita pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Metro <i>Marzuki Noor</i>	319-324
Analisis <i>Positioning</i> Merek Minyak Pelumas Mesin Sepeda Motor di Surakarta <i>Buzaki Nugroho, Magdalena Nany</i>	325-331
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Industri Kecil di Indonesia <i>Chundan Purnama</i>	332-337
Pembudayaan Masyarakat dan Kemiskinan: Studi Empiris Pemanfaatan Dana SPP dan ULP <i>Jose Rizal Joesoef, Agus Suman</i>	338-356
Persepsi Investor dan Kreditor di Indonesia terhadap <i>Audit Report</i> Milik Perusahaan Terbuka yang <i>Listed</i> di Bursa Efek Jakarta <i>Abdul Halim</i>	357-364
Kajian tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada PDAM Kota Malang) <i>Sri Handayani</i>	365-372
Analisis Pengaruh Multiperan Pedagang Besar sebagai Perantara Pemasaran terhadap Eksistensi Usaha Kecil: Studi Kasus Industri Kecil Gula Merah dari Tebu (IKGMT) di Kabupaten Kediri-Jawa Timur <i>Suparyadi</i>	373-384